

**PENGARUH PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR
SAMSAT BANDUNG TIMUR**

**Ferry Kosadi¹
Mega Sani Fadela²**

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun
Jl. Soekarno Hatta No.448 Bandung

Email : ferrykosadi@gmail.com

Email : megasfadela@gmail.com

ABSTRAK

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setelah diterapkan *Electronic Government* mengalami penurunan terlihat dari tahun 2012 ke tahun 2013 persentase target menurun. Dan semakin tahunnya terus mengalami penurunan. Metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik. Berdasarkan hasil penelitian. Penerapan *Electronic government* di Kantor SAMSAT Bandung Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial dimana t_{hitung} sebesar 0.720 dan tingkat signifikansi sebesar 0,511 atau dengan persentase penerapan *Electronic Government* (X_1) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bandung Timur sebesar 51,1%. Kualitas Pelayanan publik di Kantor SAMSAT Bandung Timur tidak

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian secara parsial dimana t_{hitung} sebesar 0.752 dan tingkat signifikansi sebesar 0.494 atau dengan persentase pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Bandung Timur sebesar 49,4%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara penerapan *Electronic Government* dan kualitas pelayanan publik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari hasil pengujian anova atau uji F yang memiliki signifikansi (sig) penelitian sebesar 0.728 dan F_{hitung} 3.343 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2.81. Selain itu, penerapan *electronic government* dan kualitas pelayanan publik sebesar 47.5% sisanya 52.5% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Kata Kunci : Penerapan *Electronic Government*, Kualitas Pelayanan Publik, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa transformasi yang signifikan pada cara organisasi bisnis dalam menyampaikan produk atau layanannya serta membangun hubungan dengan para pelanggannya. Tak ingin tertinggal dari sektor privat, pemerintah selaku organisasi sektor publik mulai menggunakan TIK dalam rangka menguatkan hubungan dengan warga negara, dunia usaha, dan sesama instansi pemerintah penggunaan TIK oleh pemerintah ini yang kemudian dikenal dengan *electronic government* atau *E- Government* (The World Bank, 2011).

Kota Bandung saat ini adalah kota yang menerapkan *smart city*. Seperti halnya yang terdapat dalam artikel (www.technoliputan6.com) yaitu:

Konsep *smart city* ini kini menjadi impian banyak kota besar di Indonesia. Konsep ini dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan yang merayap, sampah yang berserakan, ataupun pemantau kondisi lingkungan di suatu tempat. Perjalanan menuju konsep *smart city* ini juga sudah mulai berjalan pelan-pelan. Dukungan aplikasi yang terus berkembang serta terciptanya ekosistem kreatif di bidang teknologi, merupakan langkah awal yang baik menuju kota pintar. Setidaknya, hal tersebut dapat dilihat di kota semacam Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Bahkan, dalam waktu dekat, kota Bandung akan menjadi percontohan sebagai kota pintar pertama lewat konsep Bandung Technopolis.

Smart City adalah pengembangan kota berbasis ICT dimana tersedianya informasi dan infrastruktur terintegrasi antara pemerintah daerah dengan komponen bisnis, masyarakat, dan potensi daerah kota tersebut. Konsep ini sendiri melibatkan 3 (tiga) komponen, yakni teknologi, proses dan manusia. Teknologi berperan sebagai perangkat yang mempercepat terjadinya perubahan. TIK adalah salah satu contoh teknologi yang saat ini terbukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia di dunia. Sementara komponen manusia dibutuhkan karena manusia adalah penggerak utama perubahan proses dan yang memanfaatkan teknologi tersebut. Pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan TIK untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien guna memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perubahan manajemen ini mengubah perilaku pemerintah, reformasi yang sifatnya manajerial ini sangat diperlukan sebagai langkah awal untuk melakukan reformasi perilaku. Salah satunya adalah menerapkan *Electronic Government*. Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan samsat online tersebut dan dianggap telah berhasil menerapkannya adalah pemerintah kota Bandung yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kantor SAMSAT Bandung timur tidak hanya dengan samsat online saja untuk melayani masyarakat adapun yang lainnya seperti e-samsat, samsat drive thru dan samsat keliling.

Jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat khususnya Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup drastis dan menjadikan Provinsi Jawa Barat masuk 5 besar pengguna kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia. Menurut sumber BPS Bandung tahun 2014, bahwa : “Untuk Bandung sendiri saat ini, setidaknya ada 1,25 juta kendaraan bermotor di kota Bandung. Dari jumlah tersebut sekitar 94% nya adalah kendaraan pribadi.” Berikut jumlah kendaraan yang terdaftar di Bandung Timur seperti berikut:

Tabel 1
Jumlah kendaraan bermotor yang membayar BPKB Cabang Pelayanan di tahun 2014.

Jenis kendaraan	Umum	Bukan umum	Jumlah
Sedan	211	20513	20724
Jeep	0	10739	10739
Mini bus	1547	74615	76162
Bus	815	509	1324
Truck	732	15806	16538
Alat berat	0	0	0
Roda empat	211	31252	31463
Sepeda motor		312748	312748
Roda empat dan dua	211	344000	344211
Total			813909

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Jawa Barat in Figures 2015

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung semakin bertambah pula dan masyarakat yang membayar pajak mengeluhkan akan pelayanan serta sarana dan prasarana yang terjadi di kantor SAMSAT Kota Bandung. Banyaknya masyarakat yang wajib pajak membuat pelayanan samsat menjadi lama dan tidak optimal. Diperlukan

suatu inovasi baru untuk meningkatkan pelayanan dari samsat terhadap masyarakat wajib pajak. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan satu titik cerah terhadap penyelesaian masalah tersebut. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis *online web services* (eSAMSAT) atau bisa disebut dengan SAMSAT online menjadi salah satu Solusi.

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah menglobal dengan *E-Government* sangat membantu pemerintah dalam melakukan banyak hal berupa informasi kepada warga dengan bantuan teknologi informasi sehingga pemerintah tidak harus bersusah payah dalam memberikan informasi kepada warganya. Sebagai contoh yaitu suatu SAMSAT pemerintah dalam hal pembuatan dan pengurusan surat kendaraan bermotor sehingga para warga dapat langsung mengurus kegiatan baik berupa perpanjangan STNK, pembuatan BPKB

Masyarakat melakukan pembayaran pajak biasanya terjadi antrian panjang dan selama ini pelayanan publik dengan berbasis tatap muka hanya dilakukan 8 jam sehari dari hari senin sampai jum'at. Dengan *E-Government*, kantor pelayanan publik buka selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Kini tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Namun sudah dimudahkan dengan penerapan *E-Government* dalam pelayanan publik ada kala saja masyarakat yang masih enggan untuk melakukan pembayaran.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan salah satu yang diperoleh kota Bandung berskala dari sektor pajak, salah satunya seperti pajak penerimaan kendaraan bermotor yang dikelola bersama di Kantor SAMSAT Kota Bandung Timur wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta. Adapun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh selama tahun 2009-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2009	Rp 98.600.000.000	Rp 102.445.567.025	103,9%
2010	Rp 108.947.740.500	Rp 120.015.661.575	110,16%
2011	Rp 121.546.899.270	Rp 147.318.005.375	147,31%

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	Rp 157.275.620.000	Rp 195.674.327.725	122,85%
2013	Rp 201.626.297.000	Rp 227.362.770.500	112,76%
2014	Rp 236.675.839.000	Rp 254.326.584.900	107,46%
2015	Rp 276.810.624.500	Rp 279.606.938.350	101,01%

Sumber: Bidang Puslia Dispenda Provinsi dan SAMSAT Bandung Timur

Dari Tabel 2 diatas terlihat penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun dalam persentase target penerimaan pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan begitupun ditahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan. Di tahun inilah peresentase target dengan realisasi penerimaan pajak tertinggi dari tahun 2009-2015. Setelah diterapkan *Electronic Government* mengalami penurunan terlihat dari tahun 2012 ke tahun 2013 persentase target menurun. Dan semakin tahunnya terus mengalami penurunan. Tahun 2013 ke tahun 2014 menurun dan persentase target di tahun 2015 sebesar 101,01 % meskipun tidak signifiikan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih mencapai target.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Penerapan *E-Government*

Menurut Surendro didalam Zaenal Nawawi (2013: 197) tentang *egovernment* yaitu sebagai berikut:

Penerapan *E-Government* merupakan upaya pemerintah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya tersebut teknologi berperan sebagai "alat" yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Pengertian *electronic government* menurut World Bank didalam Zaenal Nawawi (2013:197) bahwa:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. (*E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti wide area networks, internet, dan computer mobile yang mempunyai kemampuan mentrasformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, aparat pemerintah).

Sedangkan menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam Zaenal Nawawi (20 13:197) *electronic government* yaitu: "*E-Government is the*

application of the Information and Communication Technology (ICT) by government agencies. E-Government merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah”

Dari uraian di atas menurut penulis, *electronic government* adalah suatu cara atau proses untuk mempermudah kegiatan di pemerintahan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi.

Kualitas Pelayanan Publik

Administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah menggunakan istilah konsepsi pelayanan kepada masyarakat dengan istilah pelayanan publik yang meliputi pelayanan administrasi, perijinan dan pelayanan umum.

Salah satu Implementasi operasional layanan sehari-hari, dikenal dengan konsep Service Quality (SerQual). Konsep ini diperkenalkan oleh A. Parasuraman, Leonard L. Berry, dan Valerie A. Zeithaml untuk menganalisis sejauh mana tingkat layanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Service Quality (SerQual) adalah salah satu konsep layanan perusahaan yang dapat diandalkan untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin erat.

Menurut Litjan Poltak (2011:5) pengertian pelayanan publik dan dalam kamus bahasa Indonesia, sebagai berikut:

“Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.”

Adapun dalam bahasa Inggris pelayanan publik yang dikemukakan Litjan

Publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam peraturan pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 telah diatur kelompok barang kena Pajak Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak

Penjualan atas barang Mewah selain kendaraan bermotor yang ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Nomor 620/PMK.3/2004 Tanggal 31 Desember 2004 tentang jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBm sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK/03/2008. Selanjutnya dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01 1/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK03/2004. Pasal 1 peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK01/2008 maknanya mengubah lampiran 1 peraturan Nomor 620/PMK03/2004. Perubahan dimaksud sejak 7 Oktober 2008.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2001 pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor."

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Pengertian dari metode penelitian menurut Menurut Sugiyono (2011:2) bahwa, "Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah." Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

1. Metode Deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi gambaran tentang ciri-ciri variabel. Menurut Sugiyono (2010:147) bahwa "metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalis."

2. Metode asosiatif, penelitian asosiatif bertujuan untuk menguji hubungan dari suatu hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda dan korelasi. Metode ini digunakan untuk menjawab identifikasi masalah no 4.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik.

PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda penelitian ini menggunakan *Software Statistic Product and Service Solution* (SPSS). Berikut hasil pengolahan data untuk model korelasi sederhana dan analisis regresi berganda pada penerapan *electronic goverment* (X_1), kualitas pelayanan publik (X_2), dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

Y : Kualitas Informasi Keuangan Daerah

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien Regresi

X_1 : Penerapan EGovernment

X_2 : Kualitas Pelayanan Publik

Berikut hasil perhitungan analisis Regresi linier berganda:

Tabel 3
Hasil perhitungan analisis linier regresi berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	98.961	36.412		2.718	.053
E_Government	.482	.669	.409	.720	.511
Kualitas_pelayanan_publik	-.306	.407	-.427	-.752	.494

a. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS

Dari tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 98.961 + 0.482 X_1 + (-) 0.306 X_2$$

Dari persamaan regresi linier r berganda diatas dapat di interpretasikan

1. Konstanta (α) sebesar 98.961, jika penerapan *Electronic Government* (X_1) dan Kualitas Pelayanan Publik (X_2) bernilai 0 maka penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 98, 96%.
2. Koefisien regresi (b_1) sebesar 0.482 hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan *Electronic Government* sebesar 1% maka penerimaan pajak kendaraan bermotor menaik 0,48 %.
3. Koefisien regresi (b_2) sebesar (-) 0.306, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan tingkat kualitas pelayanan publik sebesar 1% maka penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun 0,30%.

Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh. penerapan *E-Government* terhadap dan kualitas pelayanan publik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung secara parsial digunakan koefisien determinasi (K_d) dengan rumus Koefisien Determinasi menurut Sugiyono (2011:231), adalah :

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

K_d = Koefisien determinasi

r^2 = Kuadrat Koefisien korelasi

Tabel 4
Koefisien determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.383 ^a	.475	-.280	9.77946

a. Predictors: (Constant), Kualitas_pelayanan_publik, E_Government

b. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS

Dari tabel diatas dapat diketahui R-square adalah 0.475. Hal ini menunjukkan pengaruh penerapan *Electronic Government* dan kualitas pelayanan publik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 47.5 % sisanya 52.5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian Hipotesis Parsial Penerapan *Electronic Government* (X₁)

H₀ : β₁ = 0, artinya secara parsial penerapan *Electronic Government* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Bandung Timur.

H_a : β₁ ≠ 0, artinya secara parsial penerapan *Electronic Government* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Bandung Timur.

Kriteria : Dengan taraf signifikansi 0,10.

Jika t_{hitung} > t_{tabel} maka H₀ ditolak, Jika t_{hitung} < t_{tabel} maka H₀ diterima Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X₁ yaitu:

Tabel 5
Pengujian Hipotesis Parsial Penerapan *E-Government* (X₁)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	98.961	36.412		2.718	.053
E_Government	.482	.669	.409	.720	.511
Kualitas_pelayanan_public	-.306	.407	-.427	-.752	.494

a. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh penerapan *Electronic Government* sebesar 0.720. nilai ini akan dibandingkan dengan nilai α = 0,10, df = nk- 1 = 100-2-1 = 97, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t_{tabel} 1.66071 dan taraf signifikansi 0,511>0,10,artinya signifikan penerapan *electronic governmnet* (X₁) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (X₂). Dan dari nilai-nilai diatas terlihat bahwa nilai t_{tabel} yang diperoleh penerapan *Electronic Government* (X₁) sebesar 0.720 < 1,66071 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial penerapan

Electronic Government berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bandung Timur.

Pengujian Hipotesis Parsial Kualitas Pelayanan Publik (X₂)

H₀ : β₁ = 0, artinya secara parsial kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Bandung Timur.

H_a : β₁ ≠ 0, artinya secara parsial penerapan pelayanan publik berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Bandung Timur.

Kriteria: dengan taraf signifikansi 0,10,

Jika f_{hitung} > f_{tabel} maka Ho ditolak dan Jika f_{hitung} < f_{tabel} maka H₀ Diterima Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X₂ yaitu:

Tabel 6
Pengujian Hipotesis Parsial Kualitas Pelayanan Publik (X₂)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	98.961	36.412		2.718	.053
E_Government	.482	.669	.409	.720	.511
Kualitas_pelayanan_public	-.306	.407	-.427	-.752	.494

a. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh kulaitas pelayanan publik sebesar -0.752. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α = 0,10, df = n- k-1 = 100-2-1 = 97, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai ttabel 1.6607 1. taraf signifikansi 0,494 < 0,10 maka H₀ diterima,artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada kualitas pelayanan publik (X₂) secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y). Dari nilai-nilai diatas terlihat bahwa nilai t_{tabel} yang diperoleh Kualitas Pelayanan Publik (X₂) sebesar -0.752, berada diluar nilai t_{tabel} 1,6607 1 sesuai dengan kriteia pengujian hipotesis bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial Kualitas pelayanan

publik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Bandung Timur.

Pengujian Hipotesis simultan (Uji f)

Untuk mengetahui apakah kedua variabel bebas yang terdiri dari penerapan *Electronic Government* dan kualitas pelayanan publik secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor kantor SAMSAT Bandung Timur, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$, artinya penerapan *Electronic Government* dan kualitas penerimaan pajak kendaraan bermotor kantor SAMSAT Bandung Timur

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, artinya penerapan *Electronic Government* dan kualitas pelayanan publik berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor kantor SAMSAT Bandung Timur.

Kriteria : dengan taraf signifikansi 0,10,

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak
2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima

Tabel 7
Pengujian Hipotesis Simultan
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	65.689	4812	32.844	3.343	.728 ^a
Residual	382.552		95.638		
Total	448.240				

a. Predictors: (Constant), Kualitas_pelayanan_publik, E_Government

b. Dependent Variable: Penerimaan_pajak

Sumber: Data Diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 3,343. Nilai ini dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F dengan $\alpha = 0,10$, $df_1 = 4$ dan $df_2 = 8$, maka diketahui nilai F_{tabel} sebesar 2.81. Dari nilai-nilai diatas diketahui nilai F_{hitung} (3.343) $>$ F_{tabel} (2.81) dan besarnya signifikansi (sig) penelitian sebesar 0,728. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar

dai 0,10. Sesuai dengan kriteria uji hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari penerapan *Electronic Government* dan kualitas pelayanan publik secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor kantor SAM SAT Bandung Timur.

Pengaruh Penerapan *Electronic Government* Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bandung Timur

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil uji statistik dalam penelitian ini, diperoleh hasil yang mengungkapkan bahwa Penerapan *Electronic Government* memiliki tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dari variabel penerapan *electronic government* (X_1) yaitu nilai t_{hitung} yang diperoleh penerapan *Electronic Government* sebesar 0.720 dan nilai t_{tabel} 1.66071. Nilai tersebut terlihat bahwa penerapan *Electronic Government* (X_1) sebesar 0.720, < t_{tabel} 1,66071. Taraf signifikansi $0,511 < 0,10$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh penerapan *electronic government* (X_1) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (X_2). Dan dari nilai-nilai diatas terlihat bahwa nilai t_{tabel} yang diperoleh penerapan *Electronic Government* (X_1) sebesar $0.720 < 1,6607$ 1 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial penerapan *Electronic Government* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dengan persentase penerapan *Electronic Government* (X_1) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bandung Timur sebesar 51,1%.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bandung Timur

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil uji statistik dalam penelitian ini, diperoleh hasil yang mengungkapkan bahwa Kualitas pelayanan publik tidak pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dari variabel kualitas pelayanan publik (X_2) yaitu -0.752. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi dengan nilai t_{tabel} 1.66071. taraf signifikansi $0,494 > 0,10$, artinya signifikan pada kualitas pelayanan publik (X_2)

secara parsial terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y). Dari nilai-nilai diatas terlihat bahwa nilai t_{tabel} yang diperoleh Kualitas Pelayanan Publik (X_2) sebesar 0.752, berada diluar nilai t_{tabel} 1,6607 1 sesuai dengan kriteia pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial Kualitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dengan persentase pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Bandung Timur sebesar 49,4%.

Pengaruh Penerapan *Electronic Government* dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Bandung Timur

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil uji statistik dalam penelitian ini, diperoleh hasil yang mengungkapkan bahwa Penyusunan dan Implementasi Anggaran Biaya Produksi memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara simultan terhadap , hasil f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} dari variabel bebas. Penyusunan Anggaran Biaya Produksi (X_1) dan Implementasi Anggaran Biaya Produksi (X_2) yaitu diperoleh angka R-square adalah 0.475. hal ini menunjukkan pengaruh penerapan *Electronic Government* dan kualitas pelayanan publik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 47.5 % sisanya 52.5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Penerapan *Electronic government* di Kantor SAMSAT Bandung Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian secara parsial dimana t_{hitung} sebesar 0.720 dan tingkat signifikasi sebesar 0,511 atau dengan persentase penerapan *Electronic Government* (X_1) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bandung Timur sebesar 51,1%.
2. Kualitas Pelayanan publik di Kantor SAMSAT Bandung Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian secara parsial diman t_{hitung} sebesar 0.752 dan tingkat signifikan sebesar 0.494 atau dengan persentase pengaruh kualitas pelayanan

publik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Bandung Timur sebesar 49,4%.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara penerapan *Electronic Government* dan kualitas pelayanan publik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari hasil pengujian anova atau uji F yang memiliki signifikansi (α) penelitian sebesar 0.728 dan F_{hitung} 3.343 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2.81. maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,10. Sesuai dengan kriteria uji hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh positif tidak signifikan dari penerapan *Electronic Government* dan kualitas pelayanan publik secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor kantor SAM SAT Bandung Timur. Selain itu, penerapan *electronic government* dan kualitas pelayanan publik sebesar 47.5% sisanya 52.5% dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

DAFTAR PUSTAKA

Litjan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik teori, kebijakan dan implementasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Statistika untuk penelitian*. Bandung : PT. Alfabeta.

Zaenal Nawawi. 2013. *Manajemen pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Riwayat Hidup:

Ferry Kosadi, S.E., M.Kom. Pendidikan Terakhir S2, Sekarang menjadi Dosen Tetap di STIE INABA.

Mega Sani Fadela, S.E. merupakan alumni mahasiswa STIE INABA.